

PEMBAHARUAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN MENGHADAPI PERSAINGAN GLOBAL

M. Junus

Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makasar

Alamat korespondensi: Universitas Negeri Makasar (UNM) Jl. A.P.Pettarani Makasar 90222
Telp. (0411) 869834 - 869854

ABSTRACT

This article discusses about reform in the vocational high schools in Indonesia. Changes in the thinking paradigm, principles of implementation, and the technical policies supported by the allied parties, directly or indirectly, are needed to make the community perception towards the vocational high schools better. It is essential that the existence of the vocational high schools and their graduates be competed in competitive competition and transparency in this globalization era.

Keywords: *vocational high school, thinking paradigm, principles of implementation, global competition*

PENDAHULUAN

Perkembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia selama ini mengalami pasang dan surut. Suatu ketika jenis sekolah yang menyiapkan lulusannya untuk terjun langsung dalam dunia kerja mengalami keadaan pasang; dalam arti kehadirannya amat didambakan oleh masyarakat dan lulusannya pun banyak yang langsung terserap di dunia kerja. Pada saat yang lain sekolah yang menyiapkan lulusannya menjadi tenaga kerja terampil menengah (*middle skilled worker*) ini kehadirannya diremehkan oleh masyarakat dan lulusannya pun banyak yang menjadi beban masyarakat sebagai pengangguran.

Agar supaya kehadiran sekolah kejuruan senantiasa didambakan masyarakat dan para lulusannya pun dapat langsung diserap oleh dunia kerja maka secara periodik dan / atau kontinyu perlu dilakukan pembenahan terhadap penyelenggaraan SMK. Di dalam upaya pembenahan penyelenggaraan sekolah, yang dalam hal ini SMK, bisa dikaji berbagai kemungkinan di-

lakukannya pembaharuan pada berbagai aspek pendidikan, baik yang menyangkut konsepsi maupun pelaksanaannya.

Sebagai salah satu jenis pendidikan menengah, SMK seolah tidak pernah berhenti dipermasalahkan. Jika pada masa awal kemerdekaan SMK merupakan sekolah favorit, kini praktis SMK menjadi sekolah "kelas dua" (Samani, 2000). Lulusan SLTP yang masuk ke SMK pada umumnya bukan yang memiliki kemampuan tinggi. Mereka masuk ke SMK bukan karena pilihan, tetapi karena tidak berani atau tidak diterima di SMU. Tidak berani karena takut kalah bersaing dengan temannya yang lebih pandai atau karena tidak mampu membiayai sekolah. Jadi, asumsi bahwa lulusan SLTP yang ingin segera bekerja akan masuk ke SMK dan yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi masuk ke SMU, tidak terwujud. Artinya, lulusan SLTP "belum" menganggap bahwa untuk persiapan memasuki dunia kerja, SMK lebih cocok dibanding SMU.

Adanya persepsi seperti itu, di-

harapkan dapat memotivasi penyelenggara SMK baik pada tingkat sekolah sebagai ujung tombak pelaksana proses belajar-mengajar, maupun pada tingkat pusat yang bermain pada level kebijakan. Memasuki era global saat sekarang ini, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, SMK harus membenahi diri agar lulusannya dapat bersaing secara kompetitif dan transparan. Untuk itu, di Sulawesi Selatan pada tahun pelajaran 2006/2007. Jumlah pendaftar ke SMK naik cukup signifikan. Terutama rumpun otomotif, elektronika, dan elektro. Rata-rata peningkatan pendaftar mencapai 60% dari tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut di samping karena perubahan persepsi masyarakat terhadap SMK, juga disebabkan adanya peningkatan jumlah lulusan SLTP.

Untuk dapat menyiapkan lulusan yang dapat bersaing secara kompetitif dan transparan di era global ini, menurut hemat penulis, SMK perlu mempersiapkan diri dalam hal: (1) mengubah persepsi masyarakat terhadap SMK, (2) mengubah paradigma pemikiran, (3) menerapkan prinsip penyelenggaraan SMK yang efektif, dan (4) diperlukan kebijakan teknis yang mendukung. Tulisan ini mencoba menjelaskan keempat hal tersebut, sehingga SMK ke depan mampu bersaing secara kompetitif dan transparan di era global saat ini. Di samping itu, tulisan ini, juga dimaksudkan sebagai sumbang saran dari pemerhati pendidikan kejuruan, bagaimana melakukan pembaharuan SMK agar mampu memenuhi fungsinya menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja.

Secara historis pendidikan kejuruan (lebih luas dari SMK) telah berkembang seiring kehidupan manusia. Bahkan sangat mungkin pendidikan kejuruan merupakan pendidikan tertua, lebih tua dibanding dengan jenis pendidikan lainnya. Ketika orangtua mendidik anaknya bagaimana berburu binatang untuk dimakan atau orangtua me-

ngajari anaknya cara mencari tumbuh-tumbuhan yang dapat dimakan, sebenarnya mereka telah melakukan pendidikan kejuruan. Secara definisi pendidikan kejuruan diartikan sebagai pendidikan yang dikaitkan untuk pekerjaan tertentu, baik ketika yang bersangkutan belum dapat mengerjakan atau meningkatkan mutu pekerjaan yang selama itu sudah dikerjakan. Dalam bahasa yang lebih komprehensif dikatakan pendidikan kejuruan bertujuan untuk mempersiapkan siswa dalam memasuki bidang pekerjaan tertentu atau meningkatkan kemampuan yang bersangkutan dalam bidang pekerjaan tertentu (Evan, 1974). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian seperti itu diikuti di Indonesia.

Jika secara yuridis eksistensi pendidikan kejuruan memiliki landasan cukup kuat, secara sosiologis pun juga cukup baik. Pendidikan kejuruan diharapkan mampu menumbuhkan hubungan yang harmonis bahkan sinergis dengan sistem-sistem kemasyarakatan yang lain (ekonomi, politik, ketenagakerjaan, budaya). Mandat itu sangat besar peluang ketercapaiannya, mengingat fungsi pendidikan kejuruan pada dasarnya "melayani" dunia ekonomi ketenagakerjaan, yang tentu saja juga terkait erat dengan sistem sosial lainnya. Artinya, sejak awal memang pendidikan kejuruan dirancang terkait dengan bidang-bidang kehidupan lainnya.

Dari aspek ekonomi pendidikan kejuruan juga memiliki landasan yang cukup baik, walaupun secara teknis sering dipertanyakan. Sebagai lembaga persiapan memasuki lapangan kerja, sebenarnya pendidikan kejuruan merupakan penerapan teori human capital. Melalui investasi pada pendidikan kejuruan diharapkan dihasilkan balikan yang cukup baik, baik secara individual maupun sosial. Tentu saja untuk aspek ini efektivitas dan efisiensi program pendidikan kejuruan harus

benar-benar dibuktikan.

Namun dalam aspek ekonomi inilah justru SMK (sebagai salah satu bentuk pendidikan kejuruan) banyak mendapat sorotan. Banyak studi yang menunjukkan bahwa investasi pendidikan pada SMK memiliki *rate of return* lebih rendah dibanding SMU (Clark, 1983; Psacharopoulos et. al., 1983). Hal itu memunculkan polemik apakah SMK perlu dipertahankan atau dihapus saja, karena beberapa bukti menunjukkan bahwa SMK tidak efisien. Ke depan pendidikan apapun jenisnya, termasuk SMK ditantang untuk mampu bersaing dengan lembaga lainnya. Pendidikan tidak lagi dipahami sebagai kegiatan sosial (*public services*) semata, tetapi dipahami sebagai bentuk layanan jasa, sebagaimana restoran, telekomunikasi, jasa konsultan, dan sebagainya. Sallis (1993) menjelaskan secara baik bagaimana pendidikan dipahami sebagai bentuk layanan dan bukan sebagai bentuk fungsi produksi sebagaimana yang digunakan selama ini.

Ke depan pendidikan juga akan menjadi salah satu bentuk "industri". Maraknya iklan sekolah, perguruan tinggi, kursus/pelatihan merupakan indikator pergeseran pemahaman terhadap pendidikan. Bukankah iklan-iklan tersebut sebenarnya upaya lembaga pendidikan untuk menarik calon siswa mahasiswa? Bahkan kini sudah muncul keinginan untuk secara terbuka menyatakan bahwa pendidikan merupakan bentuk industri mulia, sehingga selayaknya dikelola oleh sebuah perseroan dan bukan oleh yayasan (Oentoro : 2000).

Pada era global saat ini, lembaga pendidikan asing akan masuk ke Indonesia dalam berbagai bentuk. Dengan penduduk 220 juta Indonesia dianggap merupakan pasar yang sangat potensial untuk berbagai produk, termasuk pendidikan. Pada saat ini pun gejalanya sudah muncul. Pameran pendidikan yang banyak berlangsung di

kota-kota besar, sebenarnya merupakan iklan sebagaimana pameran produksi-produksi yang lain. Kini juga mulai muncul berbagai bentuk waralaba pendidikan luar negeri di Indonesia. Ternyata respons masyarakat terhadap "tawaran" pendidikan dari luar negeri sangat baik. Jumlah orang Indonesia yang bersekolah ke luar negeri, termasuk level SLTA terus meningkat. Bahkan di Kalimantan Barat dan wilayah Sumatra bagian Utara (Aceh, Sumut, Riau dan Sumber) kini sedang terjadi arus anak bersekolah ke Malaysia dengan sangat deras. Iklan-iklan sederhana dari Malaysia, lengkap dengan informasi perbandingan biaya, membanjir ke wilayah tersebut (Samani, 2000).

PERUBAHAN PARADIGMA PEMIKIRAN

Mengingat persepsi masyarakat terhadap SMK negatif, sementara itu serbuan iklan dari sekolah-sekolah asing semakin gencar, maka sudah saatnya dilakukan revitalisasi terhadap SMK. Persepsi tersebut harus dapat diubah, sehingga masyarakat meyakini bahwa SMK merupakan pilihan yang tepat jika lulusan SLTP mengharapkan akan memasuki lapangan kerja setelah tamat SLTA. Untuk itu SMK harus mampu membuktikannya di lapangan dan bukan sekedar merupakan slogan.

Dalam pembaharuan, tampaknya aspek efektivitas dan efisiensi menjadi titik kritikal. Efektif artinya, program-program di SMK benar-benar sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Efisien artinya program-program tersebut dilaksanakan dengan waktu, sumberdaya dan dana yang seminimal mungkin. Efektivitas SMK akan diukur seberapa jauh program di SMK relevan dengan kebutuhan dunia kerja, sehingga lulusannya memiliki kompetensi yang diperlukan oleh lapangan kerja. Untuk ini mau tidak mau SMK harus melihat kecenderungan ketenagaker-

jaan pada tingkat menengah.

Sudah banyak ahli yang menjelaskan bahwa ke depan keterampilan manual akan digeser oleh keterampilan intelektual (Samani, 1998). Produk-produk barang kini mengarah ke bentuk-bentuk miniatur, memiliki kemampuan tinggi, dirangkai dalam bentuk modul-modul dan dirancang sebagai produk yang *single use*. Kepraktisan, kenyamanan pemakaian dan kemudahan pemeliharaan/reparsi tampaknya menjadi alasan utama. Jika peralatan seperti itu rusak, maka yang diperlukan adalah mencari bagian (modul) yang rusak dan kemudian melepas dan menggantinya dengan yang baru. Dengan demikian yang diperlukan adalah teknisi yang mampu bernalar untuk menganalisis rangkaian peralatan tersebut, sementara keterampilan manual yang diperlukan hanyalah merupakan dasar saja, yaitu sekedar melepas dan memasang kembali.

Dalam bidang pengoperasian alat/mesin, operator-operator peralatan manual akan segera digeser oleh panel kontrol, sehingga yang diperlukan bukan keterampilan manual tetapi kemampuan bernalar untuk mengendalikan berbagai peralatan melalui panel kontrol tersebut. Boiler yang pada masa lalu harus dilayani dengan berbagai peralatan manual, kini dapat dikendalikan dari panel kontrol. Operator cukup mengawasi indikator pada panel kontrol dan menganalisisnya untuk memastikan apa yang harus dilakukan. Operator seperti itu lebih banyak memerlukan bekal bernalar dan hanya sedikit memerlukan latihan yang bersifat manual. Simpulan seperti itu semakin kuat, jika diingat bahwa sebagai dampak kemajuan teknologi, perubahan peralatan terjadi sangat cepat. Teknisi akan dituntut untuk mampu mempelajari sendiri jika terjadi perubahan/perkembangan teknologi dari peralatan kerja yang digunakan. Dengan kata lain, ke depan kemampuan adaptasi dan *self training*

sangat diperlukan dan untuk itu bekal kemampuan yang *transferable skill* sangat diperlukan.

Fenomena lain yang menarik dan terkait dengan pembahasan ini adalah fakta bahwa dunia kerja tidak lagi membedakan antara SMU dengan SMK. Iklan di berbagai surat kabar seringkali hanya mensyaratkan lulusan SLTA dengan memiliki keterampilan tertentu dan atau memiliki pengalaman kerja tertentu. Seakan-akan asal sekolah (SMU atau SMK) tidak lagi menjadi pertimbangan penting. Yang lebih diutamakan adalah memiliki keterampilan atau memiliki pengalaman kerja. Fenomena ini yang mungkin menyebabkan lulusan SLTP tidak merasa harus masuk ke SMK. Walaupun setelah lulusan SLTA ingin bekerja. Dunia kerja tidak membedakan SMU atau SMK, sementara keterampilan dapat diperoleh melalui berbagai kursus keterampilan yang singkat. Jika tamat dari SMU dapat melamar pekerjaan ke bidang mana saja, sementara jika tamat dari SMK (STM) tentu merasa aneh melamar untuk menjadi tenaga administrasi dan sebaliknya tamatan SMEA akan merasa aneh jika melamar untuk menjadi operator mesin di suatu pabrik.

Fenomena lain yang kini juga terjadi adalah adanya kecenderungan peningkatan kualifikasi pendidikan yang dituntut oleh lapangan kerja. Dari iklan-iklan di berbagai surat kabar tampak bahwa posisi suatu pekerjaan yang di masa lalu mempersyaratkan lulusan SMK/SLTA kini cenderung meminta kualifikasi diploma (D1, D2, bahkan D3). Memang belum ada pengkajian terhadap fenomena ini. Apakah memang peralatan kini memerlukan operator atau teknisi dengan bekal pendidikan lebih tinggi, atau karena terjadinya kelebihan tenaga kerja, sehingga dunia kerja menuntut persyaratan yang lebih tinggi.

Untuk aspek efisiensi tampak-

nya prinsip memberikan bekal yang "pas" sesuai dengan keperluan dunia kerja dan tidak perlu "berlebihan" perlu diterapkan. Rendahnya efisiensi SMK saat ini sangat mungkin disebabkan program di SMK yang cenderung kompetensi tertentu saja. Jika dunia kerja hanya memerlukan kemampuan servis mobil, tentunya tidak perlu seseorang berlatih menghitung tenaga mobil. Di samping itu semangat SMK untuk memberikan sendiri semua bekal juga perlu direnungkan ulang.

Bertolak dari analisis tersebut di atas, tampaknya pola pendidikan di SMK perlu ditinjau ulang. Pola pendidikan di SMK seyogyanya dikemas dalam bentuk paket-paket berlapis dan siswa dapat masuk secara luwes dengan prinsip *multi entry-multi exit*. Dengan pola ini, prinsip efisiensi akan dapat dicapai. Jika seseorang hanya memerlukan satu paket keterampilan, sesuai dengan kebutuhan pekerjaannya tentu tidak perlu mengambil seluruh paket. Pola paket seperti itu akan lebih murah dan tidak memerlukan waktu yang terlalu lama. Bekal pengetahuan yang bersifat umum dapat diambil dari sekolah lain, misalnya dari SMU. Misalnya untuk program keterampilan tertentu dipersyaratkan minimal sudah pernah duduk di SMU kelas dua atau bahkan telah lulus SMU. Pola berlapis, artinya dapat dirancang bahwa suatu paket merupakan kelanjutan dari paket lainnya. Dengan demikian untuk mengambil paket lanjutan, peserta diwajibkan mengikuti paket yang menjadi dasarnya (prasyaratnya). Tentu saja harus diterapkan prinsip pengakuan terhadap pengalaman kerja, sehingga pengalaman kerja dapat diekuivalensikan dengan paket tertentu yang memang relevan.

Pola seperti itu memang mengandung risiko, seakan SMK "keluar" dari jalur persekolahan dan mulai masuk ke jalur kursus. Bahkan dapat saja ada pihak yang mengatakan SMK telah "mengambil" porsi pihak lain, yaitu

kursus keterampilan yang selama ini berada di jalur pendidikan luar sekolah. Namun ke depan pola seperti itu yang akan dapat memenuhi tuntutan dunia kerja.

Jika pola seperti itu akan ditempuh, maka diperlukan perubahan pemikiran bahwa SMK tidak harus terkurung dengan pola 3 tahunan, seperti yang tertuang dalam UUSPN No. 20 / 2003 dan PP nomor 29/1990. Dengan kata lain UUSPN No. 20/2003 dan PP No. 29/1990 perlu ditinjau kembali. Di samping itu juga perlu dibuka "tembok" pemisah antara jalur sekolah dan jalur luar sekolah, seperti pengertian yang selama ini ada. Artinya SMK dan berbagai bentuk kursus keterampilan di bawah Dikmas dan bahkan Depnaker dapat diintegrasikan (Samani, 2000).

Paket-paket keterampilan sebagaimana disebutkan di atas tampaknya tidak hanya terbatas setingkat SLTA, tetapi juga dapat menjangkau pasca SLTA. Program pendek berbasis SLTA, seperti kursus selama 6 bulan atau bahkan D1 seringkali mampu menghasilkan lulusan dengan kompetensi jauh lebih baik dibanding pola SMK selama ini. Dunia kerja juga lebih memilih pola itu dibanding SMK, sementara dari aspek pembiayaan ternyata SMU plus D1 lebih murah dibanding SMK 3 tahun. Sekolah Ahli Kejuruan Teknik Industri (SAKTI) di Surabaya telah membuktikan hal itu.

Untuk mengarah ke pola tersebut di atas, tampaknya ada rintangan cukup berat, yaitu perubahan pola pikir. Selama ini kita sudah dipola bahwa SLTA, termasuk SMK harus 3 tahun. Sekolah lain dengan kursus dan oleh karenanya harus dibina oleh dua instansi yang berbeda. Sekolah tidak boleh menangani pendidikan pasca SLTA, karena itu wewenang perguruan tinggi, dan seterusnya. Namun perubahan pola pikir seperti itu sangat diperlukan agar kita dapat keluar dari belenggu yang menyebabkan SMK di-

persepsi sebagai sekolah "kelas dua", karena dianggap gagal mengembangkan program yang relevan dan efisien.

PRINSIP PENGEMBANGAN SMK

Untuk mendukung pola pendidikan yang ditawarkan di atas, yaitu pola pendidikan yang bersitat paket-paket berlapis, dan prinsip *multi-entry-multi-exit*, serta mengimbangi perkembangan teknologi yang berimplikasi pada pembekalan keterampilan *vokasional* kepada siswa SMK, sehingga dapat berjalan dengan cepat maka ada beberapa prinsip penyelenggaraan pendidikan kejuruan yang harus diperhatikan. Prinsip yang dimaksud antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan kejuruan harus dapat dilaksanakan secepat mungkin (*education in short*).
2. Pendidikan kejuruan dalam pengembangannya harus berorientasi kepada jenis-jenis pekerjaan yang dibutuhkan di lapangan (*orientation*).
3. Pendidikan kejuruan diatur sedemikian rupa supaya siswa dapat keluar dan masuk lembaga pendidikan secara mudah (*free entry exit*).
4. Apa pun yang dilakukan pendidikan kejuruan harus disesuaikan dengan permintaan pasar (*demand driven*), bukan pasar yang harus menyesuaikan pendidikan kejuruan.
5. Pengembangan pendidikan kejuruan harus terbuka atas terjadinya interaksi antar disiplin ilmu serta disiplin teknologi (*cross discipline*).
6. Pendidikan kejuruan haruslah berani mengembangkan teknologi yang sedang dan akan berkembang (*forward technology*).

Keenam prinsip penyelenggaraan pendidikan kejuruan tersebut, tidak sepenuhnya dapat dipenuhi di da-

lam kasus pengembangan SMK di Indonesia sekarang ini. Mengenai pelaksanaan pendidikan kejuruan yang harus secepat mungkin misalnya; karena pelaksanaan SMK di Indonesia terpa-ku pada struktur kurikulum yang kaku. Proses penyelesaian pendidikan itu baru dapat dilaksanakan setelah siswa menyelesaikan kurikulum. Akibatnya, untuk menyelesaikan program keterampilan *vokasional* tertentu di bidang permesinan, misalnya untuk menjadi seorang yang sanggup menguasai mesin bubut dasar (*basic lathe machine*) harus menunggu tiga tahun. Pada hal keterampilan *vokasional* tersebut akan segera dipakai untuk mengambil pekerjaan (*job*) di lapangan.

KEBIJAKAN TEKNIS

Di samping masalah persepsi, paradigma pemikiran, dan prinsip seperti tersebut di atas, masalah kebijakan teknis perlu menjadi prioritas dalam penyelenggaraan SMK. Kadang-kadang suatu kebijakan teknis, yang ketika dioperasionalisasikan di lapangan mengalami deviasi yang serius. Kebijakan teknis yang dimaksud antara lain menyangkut kurikulum, uji kompetensi dan sertifikasi, serta masalah akreditasi sekolah.

Sekarang ini SMK di Indonesia mengaplikasikan Kurikulum Berbasis Kompetensi. Upaya Depdiknas mengembangkan kurikulum pendidikan kejuruan yang mengakomodasi potensi yang ada di luar sekolah memang pantas diakui. Namun demikian banyak hal yang dalam operasionalnya bertentangan dengan kaidah pendidikan sehingga hasilnya jauh dari harapan, bahkan tidak produktif sama sekali. Sebagai misal, siswa SMK yang sedang melaksanakan Praktek Industri (PI) diizinkan untuk tidak mengikuti aktivitas di dalam kelas (*indoor activity*), termasuk ulangan harian dan ujian semester atau catur wulan. Idenya cukup bagus karena kesempatan meng-

gali ilmu dan keterampilan di dunia kerja haruslah dimanfaatkan secara optimal, akan tetapi hal ini ternyata memunculkan kekacauan dalam sistem administrasi sekolah. Banyak siswa yang tidak dapat nilai di sekolah karena harus menyelesaikan PI-nya; ironisnya siswa yang PI-nya bagus justru nilai sekolahnya rendah.

Penerapan kurikulum SMK sendiri masih menggunakan paradigma lama yang sudah kadaluwarsa, yaitu memandang bahwa tanpa dengan meningkatkan profesionalisme guru pun, dengan memberikan sedikit "ancaman" kepada kepala sekolah, kurikulum bisa dijalankan di lapangan. Keadaan tersebut jelas tidak produktif. Buktinya, sekarang ini sudah akhir tahun 2000, tetapi masih banyak sekolah yang belum menjalankan kurikulum terbaru SMK. Pada banyak sekolah yang sudah menjalankan kurikulum terbaru, para guru sekedar menjalankan kurikulum secara fisik di dalam arti tidak disertai dengan semangat yang mendasari disusunnya kurikulum tersebut.

Tentang uji kompetensi demikian pula halnya. Munculnya ide uji kompetensi sebenarnya adalah kegiatan yang dibuktikan dengan sertifikat keterampilan atau keahlian untuk lebih meyakinkan dunia kerja mengenai keterampilan *vokasional* yang dikuasai oleh lulusan SMK. Ide ini muncul dikarenakan dalam realitasnya banyak lembaga kerja lembaga kerja yang tidak percaya akan validitas ijazah atau STTB yang dimiliki oleh kebanyakan para lulusan SMK. Dengan demikian uji kompetensi sifatnya alternatif dan hukumnya "sudah"; maksudnya bagi sekoiah yang validitas ijazah lulusannya telah dipercaya oleh dunia kerja boleh saja siswa tidak mengambil uji kompetensi.

Apa yang terjadi sekarang ini? Di dalam pelaksanaannya di berbagai daerah, uji kompetensi itu sifatnya utama serta hukumnya "wajib". Para siswa yang mengikuti uji kompetensi ini

diharuskan membayar dalam jumlah yang seringkali sangat memberatkan untuk ukuran kebanyakan siswa dan orang tua siswa. Bagi banyak kepala sekolah, guru dan siswa, uji kompetensi berubah menjadi "momok" yang menakutkan; itu pun sertifikat yang diperoleh siswa terkadang tidak memberikan benefit karena tidak dipercaya dunia kerja.

Sertifikasi uji kompetensi juga terkesan sentralistik dan ekstra administratif. Konon format kosong sertifikat dikirim dari Pusat dan pencetakannya dilaksanakan oleh wilayah; sedangkan penandatanganannya dilakukan oleh Pimpinan Kadin Tingkat 2. Dari data ini saja sudah terlihat bahwa orang wilayah tidak diberi kebebasan untuk berkreasi, di samping mekanismenya tentu panjang hanya untuk sekedar mendapatkan sertifikat. Kesalahan yang fatal dari sisi akademis adalah tidak tepat kalau pimpinan Kadin yang bertanda tangan di dalam sertifikat. Bukankah Kadin itu kamar dagang, bukan asosiasi profesi yang punya otorisasi bidang keilmuan.

Melihat realitas tersebut di atas maka konsep dan operasionalisasi uji kompetensi harus ditinjau ulang, meskipun hal ini belum dilaksanakan secara melembaga. Perlu dibentuk tim yang mengkaji pelaksanaan uji kompetensi secara objektif untuk mengambil kesimpulan yang tidak salah.

Selanjutnya mengenai akreditasi sekolah juga diperoleh kasus yang serupa. Paradigma yang digunakan untuk mengakreditasi SMK masih menggunakan paradigma klasik yang feodalistik. Dalam paradigma ini menganggap sekolah swasta sebagai sekolah kelas dua dan hanya sekolah swasta yang pantas diakreditasi. Terminologinya pun menggunakan terminologi "kolonial", Terdaftar, Diakui, dan Disamakan. Jadi, bila ada SMK swasta yang diberi status akreditasi Disamakan, maka muncul pertanyaan, disa-

makan dengan apa? Secara konotatif tentu disamakan dengan SMK negeri, padahal banyak pula SMK negeri yang berkualitas rendah. Pertanyaannya ialah, apakah SMK swasta yang baik harus disamakan dengan SMK negeri yang berkualitas rendah. Logika seperti ini sulit diterima oleh akal sehat dan bertentangan dengan semangat reformasi pendidikan yang baru kita bangun.

Pada masa yang akan datang sistem akreditasi semacam itu harus diakhiri. Dengan digungkannya konsep akuntabilitas publik, maka akreditasi SMK, juga untuk SD, SLTP, SMU dan PT, nantinya harus dilakukan oleh masyarakat. Adapun bentuknya bisa saja merupakan badan yang keanggotaannya terdiri dari tokoh masyarakat, asosiasi profesi, kalangan industri, pakar pendidikan, serta unsur birokrasi departemen pendidikan.

Badan akreditasi di masa depan bukanlah badan akreditasi yang bertanggung jawab kepada menteri pendidikan seperti Badan Akreditasi Nasional (BAN) untuk mengakreditasi perguruan tinggi sekarang ini. Badan akreditasi SMK di masa depan adalah badan yang bebas dari kooptasi pemerintah sehingga bisa bekerja dengan jujur dan objektif tanpa takut mengambil keputusan yang jujur dan objektif pula.

Sebelum sistem akreditasi yang baru dan reformatif tersebut dapat direalisasikan maka pelaksanaan akreditasi yang masih berjalan sekarang ini harus segera dihentikan. Pelaksanaan akreditasi saat itu lebih banyak merugikan daripada menguntungkan dalam konsep pengembangan SMK itu sendiri.

PENUTUP

Ke depan kita memerlukan perubahan pola pikir terhadap SMK. Pola pendidikan di SMK seyogyanya dikemas dalam bentuk paket keterampilan berlapis-berjenjang, dengan menerapkan

prinsip *multi entry-multi exit*. Dalam batas tertentu pola "SMK baru" tersebut dapat menjangkau pendidikan keterampilan pasca SLTA. Dengan masukan lulusan SMU, pola ini ternyata "lebih murah" dibanding dengan SMK 3 tahun.

Pola yang diajukan tersebut sangat mungkin akan "bertabrakan" dengan berbagai perangkat aturan yang selama ini ada dan bahkan dengan berbagai kepentingan. Untuk itu pada tahap awal, direkomendasikan untuk melakukan uji coba atau rintisan di beberapa SMK. Jika rintisan tersebut ternyata berhasil membuktikan keunggulannya, maka pola baru itu secara bertahap akan mengubah pola pikir kita dan pada saatnya dapat dijadikan landasan untuk mengubah aturan yang selama ini membelenggu SMK.

Prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan kejuruan dalam konteks SMK belum sepenuhnya dilaksanakan. Oleh karena itu, diharapkan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan SMK di Indonesia hendaknya senantiasa dapat melaksanakan prinsip penyelenggaraan pendidikan kejuruan secara penuh supaya kualitas SMK di Indonesia dapat ditingkatkan secara nyata. Kemudian, penulis menyarankan agar (1) ditata kembali sistem penyusunan dan operasionalisasi kurikulum SMK, (2) dikaji ulang pelaksanaan uji kompetensi dan sistem sertifikasinya, serta (3) diakhiri sistem akreditasi SMK yang terlalu feodalistik untuk segera diterapkan sistem akreditasi baru yang reformatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Clark, David H. (1983). *How Secondary School Graduates Perform in the Labor Market: A Study of Indonesia*. Washington DC: The World Bank.
- Evans, Rupert N. (1974). *Foundation of Vocational Education*. Columbus, Ohio: Charles E. Merrill Publishing Co.
- Oentoro, Johannes. (2000). *Perbaikan Sistem Pendidikan untuk Menunjang Dunia Industri*. Makalah Utama pada Konvensi Nasional Pendidikan IV di Jakarta, 19-22 September 2000.
- Psacharopoulos, G., Hinchiffe, K., Dougherty, C. & Hollister, R. (1983). *Manpower Issues in Educational Investment: A Consideration of Planning Processes and Techniques*. Washington DC: The World Bank.
- Sallis, Edward. (1993). *Total Quality Management in Education*. London: Kogan Page Limited.
- Samani, Muchlas. (1991). *Keefektifan Pendidikan pada STM: Studi Pelacakan terhadap Lulusan STM di Kotamadya Surabaya*. Jakarta: PPS IKIP Jakarta.
- _____. (1998). *Pendidikan Menengah Kejuruan Menyongsong Millenium III*. Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar dalam Bidang Pendidikan Kejuruan di Universitas Negeri Surabaya.
- _____. (2000). *Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan*. Makalah Disampaikan pada Diskusi di Pusat Penelitian Kebijakan Balitbang Depdiknas Jakarta.